

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**WORKSHOP FASILITASI PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

---

---

**A. PENDAHULUAN**

Penduduk adalah bagian penting dari pembangunan, Indonesia memiliki populasi yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 270.203.917 jiwa (SP BPS, 2020). Sedangkan jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 adalah 36.516.035 jiwa, dengan luas wilayah 34.337,48 hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa. Kepadatan penduduk yang di Provinsi Jawa Tengah ini bisa menimbulkan permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan yang dimaksud antara lain terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan.

Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan mencari nafkah, tetapi penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan dari pada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045 dibutuhkan bekal yang mampu mengimbangi ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah untuk mampu memanfaatkan kesempatan emas ini dengan baik. Salah satu bekal yang sangat penting yakni pendidikan, karena pendidikan yang berkualitas tentunya akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Pendidikan yang perlu ditanamkan kepada calon generasi emas salah satunya adalah pendidikan kependudukan.

Pendidikan kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan. Pendidikan kependudukan dapat dipahami pula sebagai proses mempelajari dan memperluas ilmu pengetahuan tentang masalah kelompok masyarakat atau penduduk dan dampaknya terhadap mutu kehidupan.

Sebagai usaha untuk menanamkan Pendidikan kependudukan di satuan pendidikan tingkat SMA/SMk Provinsi Jawa Tengah adalah dengan membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, dimana di dalamnya terdapat pojok kependudukan

sebagai salah satu sumber belajar peserta didik. Pojok kependudukan merupakan perpustakaan mini yang berisikan informasi program KKBPK baik dalam bentuk design berupa gambar, grafik, peta dan ornament-ornamen kependudukan baik manual maupun digital.

Berdasarkan website Sekolah Siaga Kependudukan (<https://monevpenduk.org/>) sampai saat ini sudah terbentuk di 34 sekolah tingkat SMA/SMK Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Klasifikasi
1	SMA N 1 Bantarsari	Terdaftar
2	SMK DIPONEGORO MAJENANG	Terdaftar
3	SMA NEGERI 2 PURWOKERTO	Paripurna
4	SMA NEGERI 4 PURWOKERTO	Dasar
5	SMK NEGERI 1 KALIGONDANG	Paripurna
6	SMA NEGERI 1 KARANGKOBAR	Paripurna
7	SMA NEGERI 1 PREMBUN	Paripurna
8	SMA NEGERI 1 PURWOREJO	Dasar
9	SMA MUHWONOSOBO	Paripurna
10	SMA NEGERI 1 WONOSOBO	Paripurna
11	SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID	Paripurna
12	SMA NEGERI 2 GRABAG	Paripurna
13	SMAN 1 DUKUN	Paripurna
14	SMA NEGERI 1 NGLUWAR	Paripurna
15	SMA MUH 2 MUNTILAN	Dasar
16	SMA ISLAM SUDIRMAN KALIANGK	Dasar
17	SMA ISLAM SUDIRMAN PAKIS	Dasar
18	SMK MUHAMMADIYAH DUKUN	Paripurna
19	SMK MA'ARIF KOTA MUNGKID	Dasar
20	SMA NEGERI 2 BOYOLALI	Paripurna
21	SSK SMA NEGERI 1 KLATEN	Paripurna
22	SMA NEGERI 3 KLATEN	Dasar
23	SMAN 1 KARANGANOM	Paripurna
24	SMA NEGERI 1 CAWAS	Terdaftar
25	SMK NEGERI 3 SUKOHARJO	Paripurna
26	SMK NEGERI 1 SUKOHARJO	Dasar
27	SMA NEGERI 1 WONOGIRI	dasar
28	SMA NEGERI 1 SRAGEN	Paripurna
29	SMA NEGERI 1 PULOKULON	dasar
30	SSK SMA NEGERI 1 NGAWEN	Paripurna
31	SMA NEGERI 2 CEPU	dasar
32	SMA NEGERI 1 REMBANG	Paripurna

33	SMA NEGERI 3 PATI	Paripurna
34	SMA NEGERI 1 KAYEN	Dasar
34	SMA MASEHI JEPARA	Paripurna
35	SMA NEGERI 1 PECANGAAN	dasar
36	SSK SMAN 1 KARANGTENGAH	Paripurna
37	SSK SMA NEGERI 2 DEMAK	Dasar
38	SMA NEGERI 1 KARANGANYAR	Dasar
39	SMA MA'ARIF SRUMBUNG	Dasar
40	SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG	dasar
41	SMK NEGERI PRINGSURAT	terdaftar
42	SMA NEGERI 1 CEPIRING	Paripurna
43	SMA NEGERI 1 KENDAL	Paripurna
44	SMA NEGERI 2 KENDAL	Paripurna
45	SMA NEGERI 1 BOJA	Paripurna
46	SMA NEGERI 1 KALIWUNGU	Dasar
47	SMA NEGERI 1 CAWAS	Terdaftar
48	SMA NEGERI 1 JOGONALAN	Terdaftar
49	SMA NEGERI 1 GEMUH	Paripurna
50	SMA NEGERI 1 BOJONG	Paripurna
51	SMA NEGERI 3 PEMALANG	Paripurna
52	SMA NEGERI 3 TEGAL	Paripurna
53	SMA NEGERI 4 MAGELANG	dasar
54	SMA BATIK 1 SURAKARTA	Paripurna
55	SMA BATIK 2 SURAKARTA	Paripurna
56	SMA NEGERI 2 SURAKARTA	Paripurna
57	SMAN 8 SURAKARTA	Paripurna
58	MAN 1 SURAKARTA	Paripurna
59	SSK SMA NEGERI 2 SALATIGA	Paripurna
60	SMA NEGERI 6 SEMARANG	Paripurna
61	SMA NEGERI 1 SEMARANG	Paripurna
62	SMA ISLAM KOTA PEKALONGAN	terdaftar
63	SMA NEGERI 3 TEGAL	paripurna
64	SMA N 1 BANTARSARI	Terdaftar

Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah dengan maksud dan tujuannya supaya pelajar menjadi generasi penerus yang berkualitas, serta memiliki pemahaman, sikap dan perilaku yang baik, serta pengetahuan dan wawasan tentang kependudukan dan KB, termasuk permukiman dan sanitasi, serta waktu atau usia menikah.

Guna mencapai tujuan di atas, maka perlu diadakan Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kota Magelang.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 15);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

10. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: 00722/DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Tahun 2024.

### **C. TUJUAN**

Tujuan Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024:

1. Meningkatkan komitmen dari para pengambil kebijakan dalam mewujudkan Pendidikan kependudukan di satuan Pendidikan tingkat SMA/SMK.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah.

### **D. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023:

1. Meningkatnya komitmen dari para pengambil kebijakan dalam mewujudkan Pendidikan kependudukan di satuan Pendidikan tingkat SMA/SMK.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah.

### **E. PELAKSANAAN**

#### 1. Waktu

Kegiatan Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan dilaksanakan pada 24 Juli 2024.

#### 2. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan dilaksanakan di Kota Magelang.

#### 3. Peserta

Peserta kegiatan Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang terdiri Kepala SMA/SMK dan Guru SMA/SMK di Kota Magelang, serta pembina SSK Kota Magelang.

## **F. ANGGARAN**

Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

## **G. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.